



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS

Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. SE, M.Eng
Deputi Menteri Bidang SDM Aparatur

SOSIALISASI PP NOMOR 30 TAHUN 2019 DAN PENGAYAAN SUBSTANSI
DRAFT RANCANGAN PERMENPANRB: SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS

Jakarta, 16 Oktober 2019



7TH

SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

OUTLINE

1 ISU GLOBAL

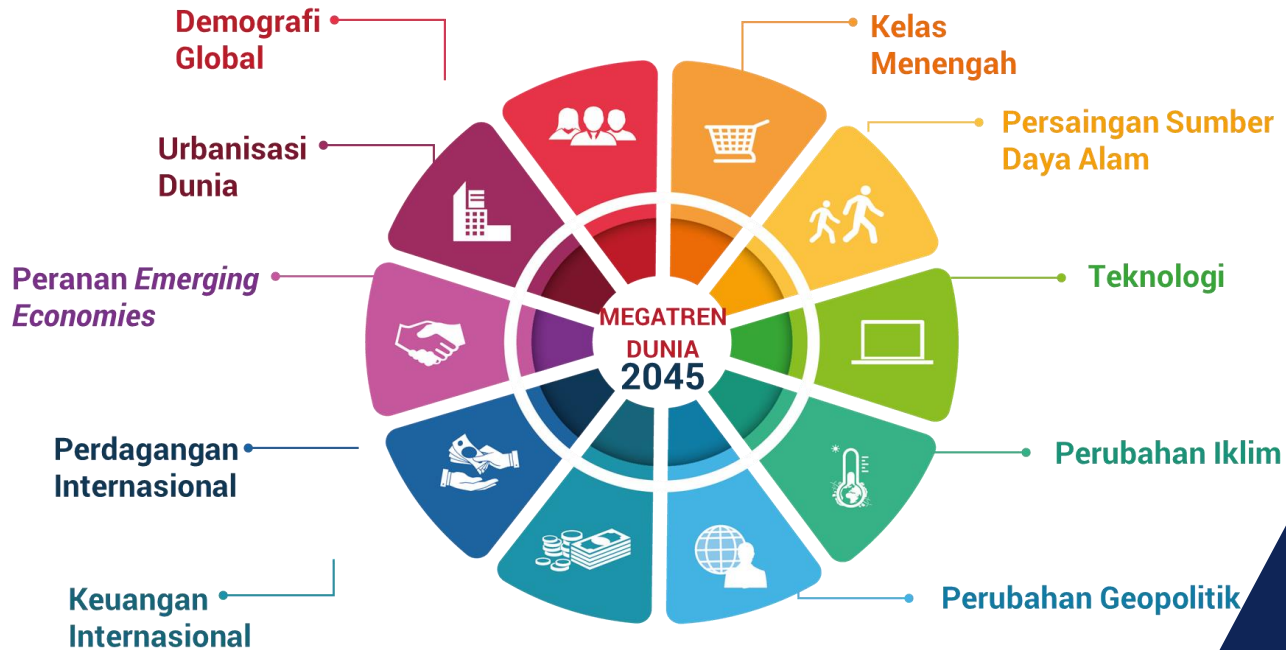
2 VISI INDONESIA MAJU

3 IMPLIKASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PNS



ISU GLOBAL

Megatren Dunia 2045



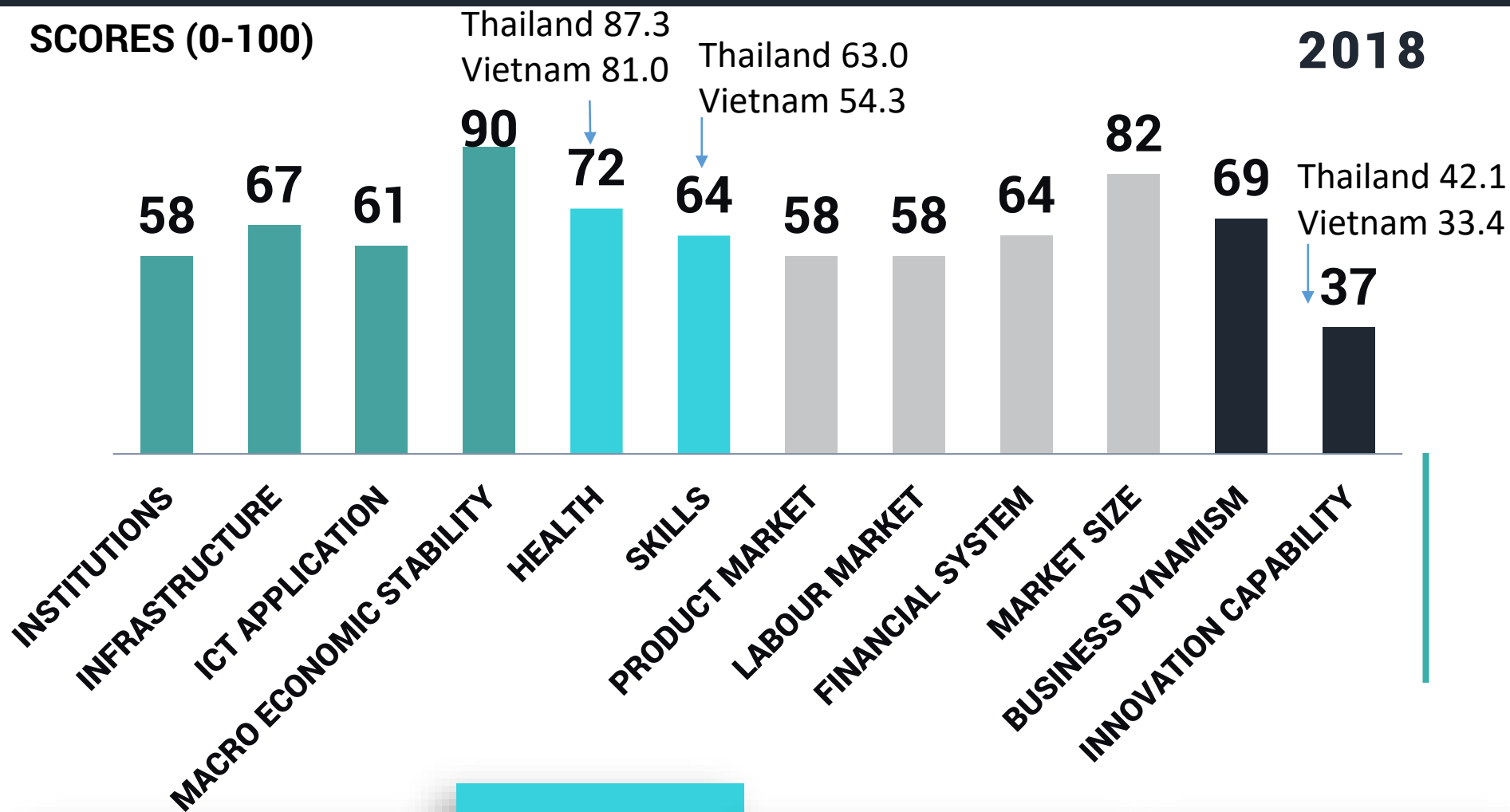
10 megatren

- **DEMOGRAFI GLOBAL**
- **MIDDLE INCOME CLASS**
- **TEKNOLOGI**

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 4.0

INDONESIA

SCORES (0-100)



Ranking
45th/₁₄₀

Thailand 38
Vietnam 77

ENABLING
ENVIRONMENT

**HUMAN
CAPITAL**

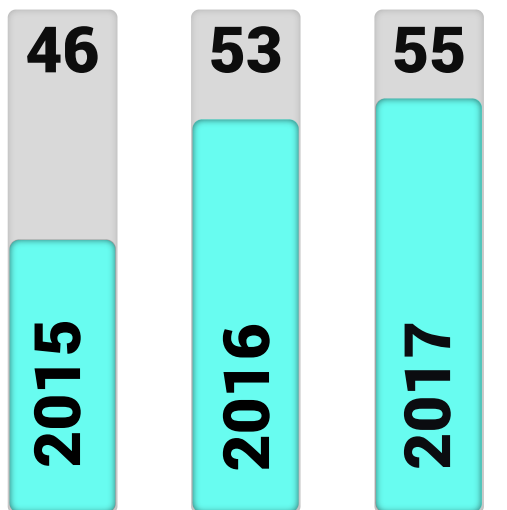
MARKETS

INNOVATION
ECOSYSTEM

GOVERNMENT EFFECTIVENESS INDEX

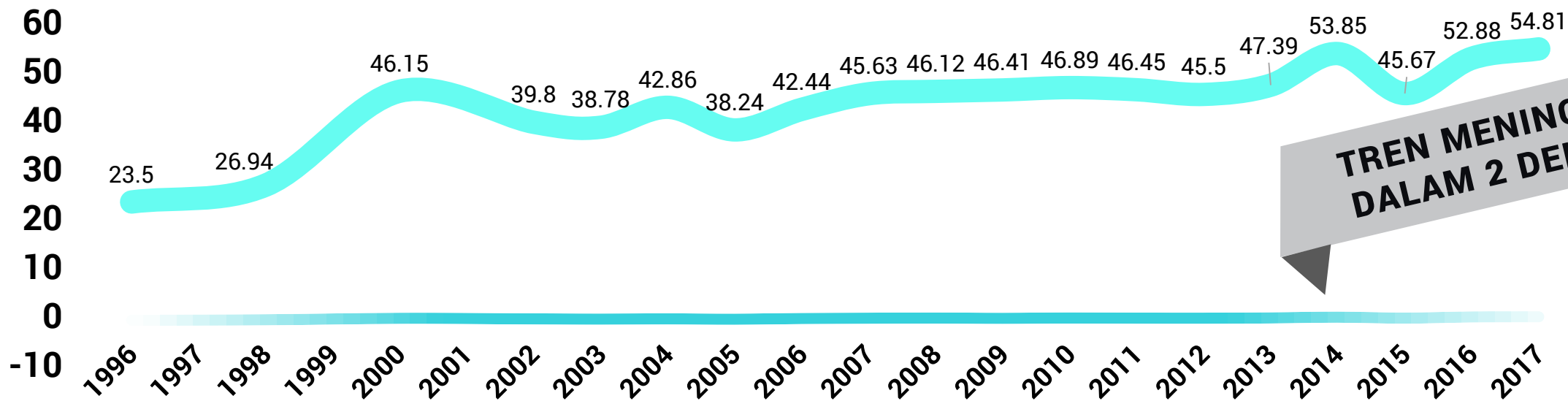


PERINGKAT INDONESIA



GAMBARAN PERSEPSI:

- KUALITAS LAYANAN PUBLIK
- KUALITAS ASN
- INDEPENDENSI DARI TEKANAN POLITIK
- KUALITAS FORMULASI & IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
- KREDIBILITAS KOMITMEN PEMERINTAH



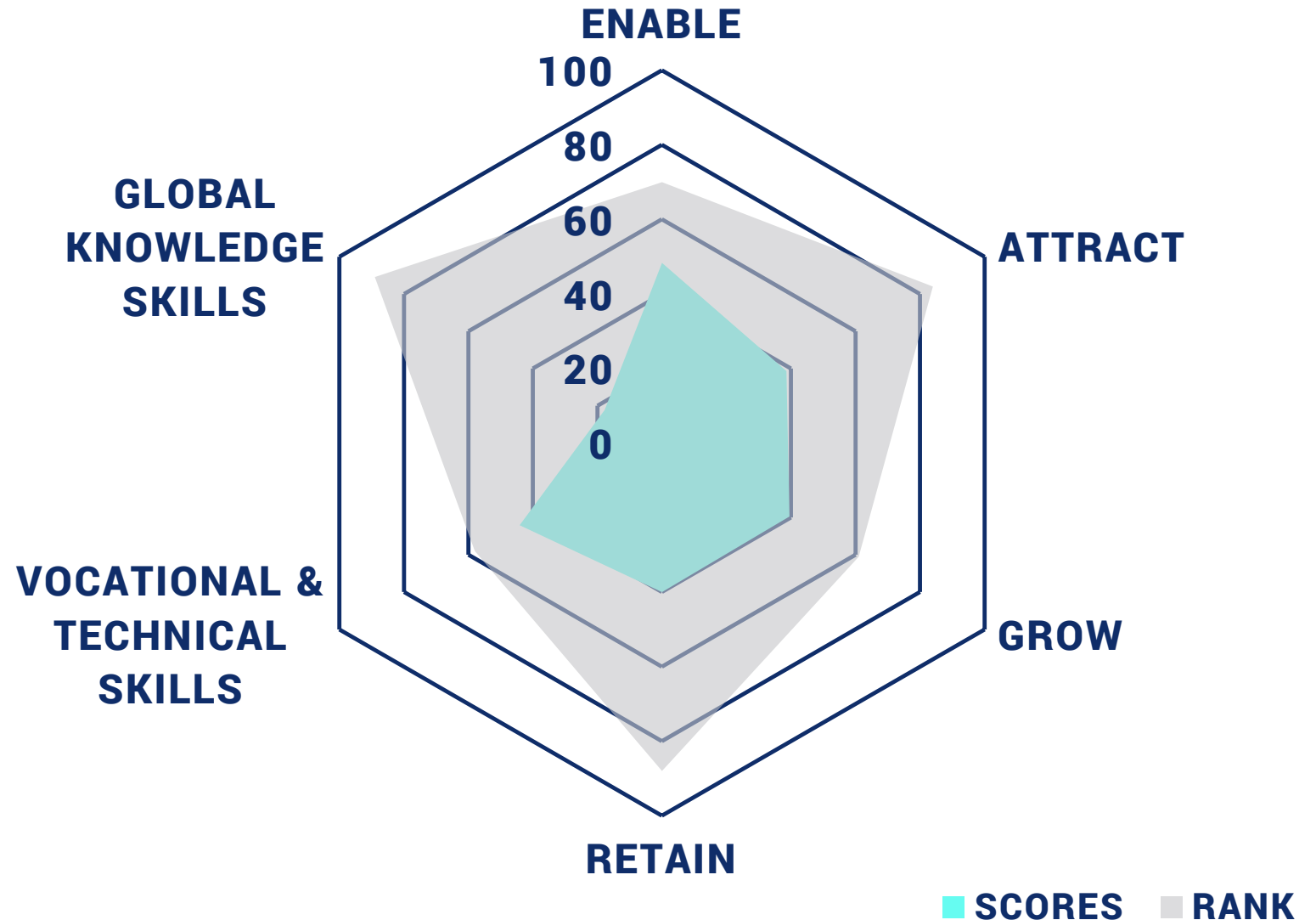
**TREN MENINGKAT
DALAM 2 DEKADE**

GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS INDEX

INDONESIA

2018 PERINGKAT
77th / 119

Score **38.04**



AKSES DIGITAL PENDUDUK INDONESIA 2019

POPULASI

268 juta

LANGGANAN
MOBILE

355 juta

PENGGUNA
INTERNET

150 juta

PENGGUNA
AKTIF SOSMED

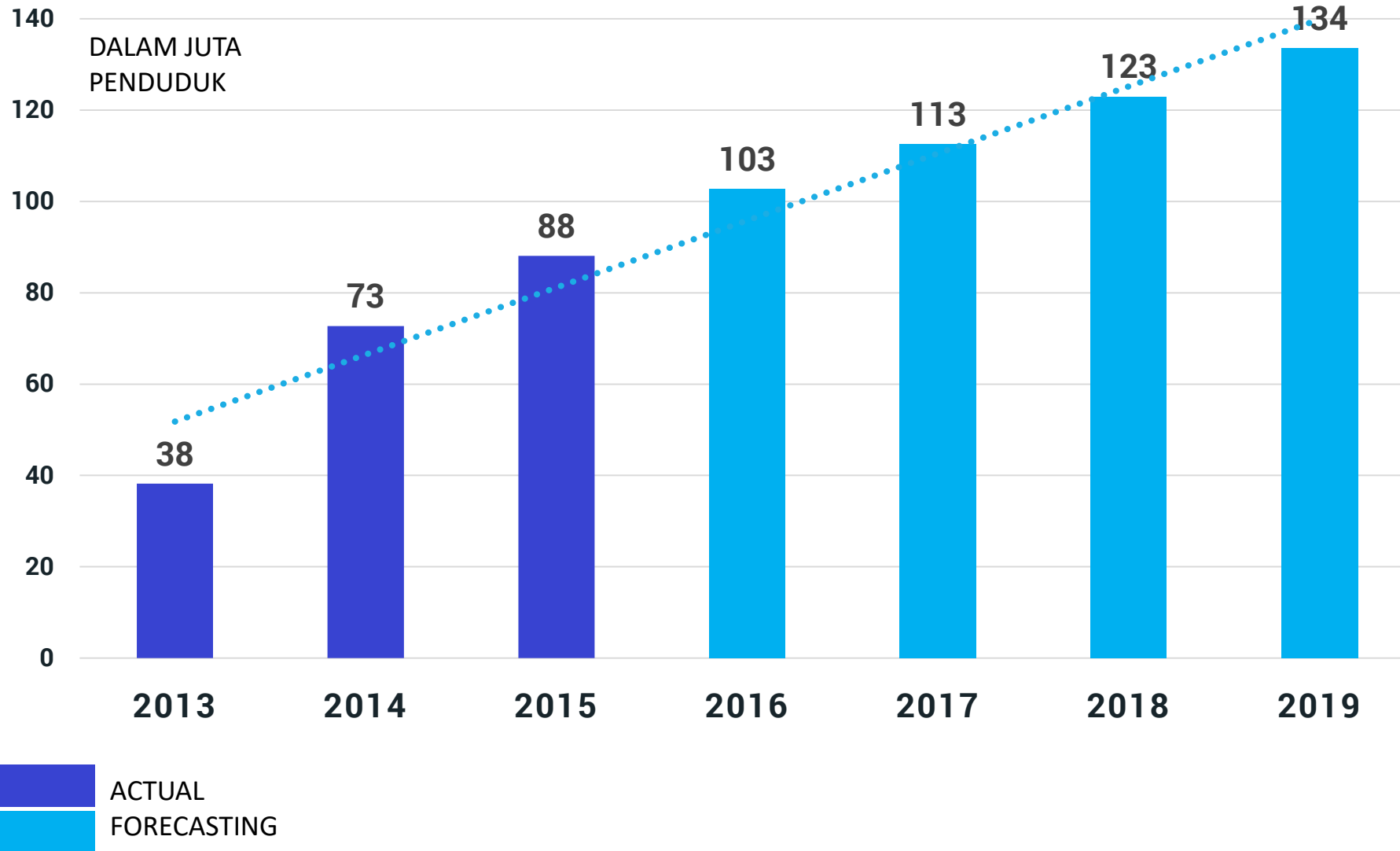
150 juta

PENGGUNA
SOSMED VIA
MOBILE

130 juta



TREN PENINGKATAN PENGGUNAAN INTERNET DI INDONESIA 2013-2020



**TREN PENINGKATAN
PENGGUNAAN INTERNET
MERUPAKAN PELUANG
DAN TANTANGAN DALAM
SISTEM MANAJEMEN
KINERJA BERBASIS IT**

TANTANGAN TRANSFORMASI DIGITAL



SOCIETY 5.0
INDUSTRI 4.0

Digital Transformation
AI, IoT, Big Data,
Robotics, Blockchain



23

JUTA

PEKERJAAN (OUTPUT) AKAN TERGANTIKAN DENGAN OTOMATISASI

PEKERJAAN YG BERPOTENSI TINGGI TEROTOMATISASI:

- PEKERJAAN REPETITIF (PENGUMPULAN DAN PROSES DATA)
- PEKERJAAN DENGAN AKTIVITAS FISIK YG DAPAT DIPETAKAN

27

S.D.

46

JUTA

PEKERJAAN (OUTPUT) BARU AKAN MUNCUL



VISI INDONESIA MAJU

ARAHAN 2020-2024

INFRASTRUKTUR

**SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)**

INVESTASI

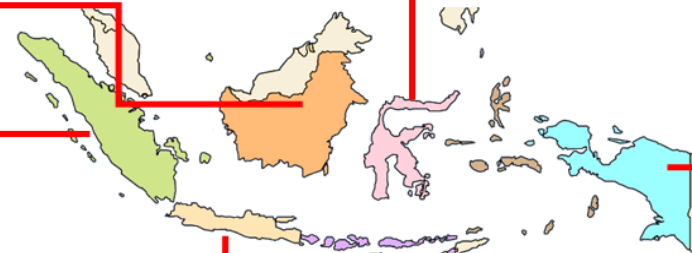
**REFORMASI
BIROKRASI**

**PENGUNAAN
APBN**



KONDISI KESESUAIAN KOMPETENSI ASN DAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL

Prosentase Jabatan Teknis terhadap Jabatan ASN per Pulau di Indonesia



WILAYAH KALIMANTAN

JABATAN	PERSENTASE JABATAN
Bidang Perkebunan/Pertanian/ Penyuluh	2,46%
Bidang Industri (poros maritim/Infrastuktur)	0.09%
Bidang Pertambangan/geologi	0.06%

Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perakayuan

WILAYAH SUMATERA

JABATAN	PERSENTASE JABATAN
Bidang Perkebunan/Pertanian dan Penyuluh	2.2%
Bidang Industri	0.07%
Bidang Pertambangan/geologi	0.05%

Kelapa Sawit, Karet, Batu Bara, Perkapalan, Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda

WILAYAH SULAWESI

JABATAN	PERSENTASE JABATAN
Bidang Pertanian/perkebunan	2.6%
Bidang Perikanan	0.1%
Bidang Pertambangan/geologi	0.01%

Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao, Perikanan, Nikel, Minyak dan Gas, Bumi (Migas)

WILAYAH MALUKU PAPUA

JABATAN	KEBUTUHAN
Bidang Perikanan	0.25%
Bidang Pertanian/perkebunan	1.63%
Bidang Pertambangan	0.03%

Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga, Nikel, Minyak dan Gas Bumi, Perikanan

WILAYAH JAWA

JABATAN	PERSENTASE JABATAN
Bidang transportasi	0.12%
Bidang Industri	0.25%

Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area

WILAYAH BALI NUSA TENGGARA

JABATAN	PERSENTASE JABATAN
Pariwisata	0.5%
Bidang Perikanan	0.4%
Bidang Peternakan	2.23%

Pariwisata, Perikanan, Peternakan



IMPLIKASI KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PNS

APARATUR SIPIL NEGARA

UU 5 TAHUN 2014

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PNS

PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS

PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

PPPK

PP 49 TAHUN 2018
MANAJEMEN PPPK

PNS & PPPK

MENGISI JABATAN
PEMERINTAHAN
&
MELAKSANAKAN
TUGAS PEMERINTAHAN



DASAR HUKUM

PENILAIAN KINERJA PNS

UU 5 TAHUN 2014
APARATUR SIPIL NEGARA

PASAL 78

Ketentuan lebih lanjut
mengenai penilaian kinerja
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

PP NOMOR 30 TAHUN 2019

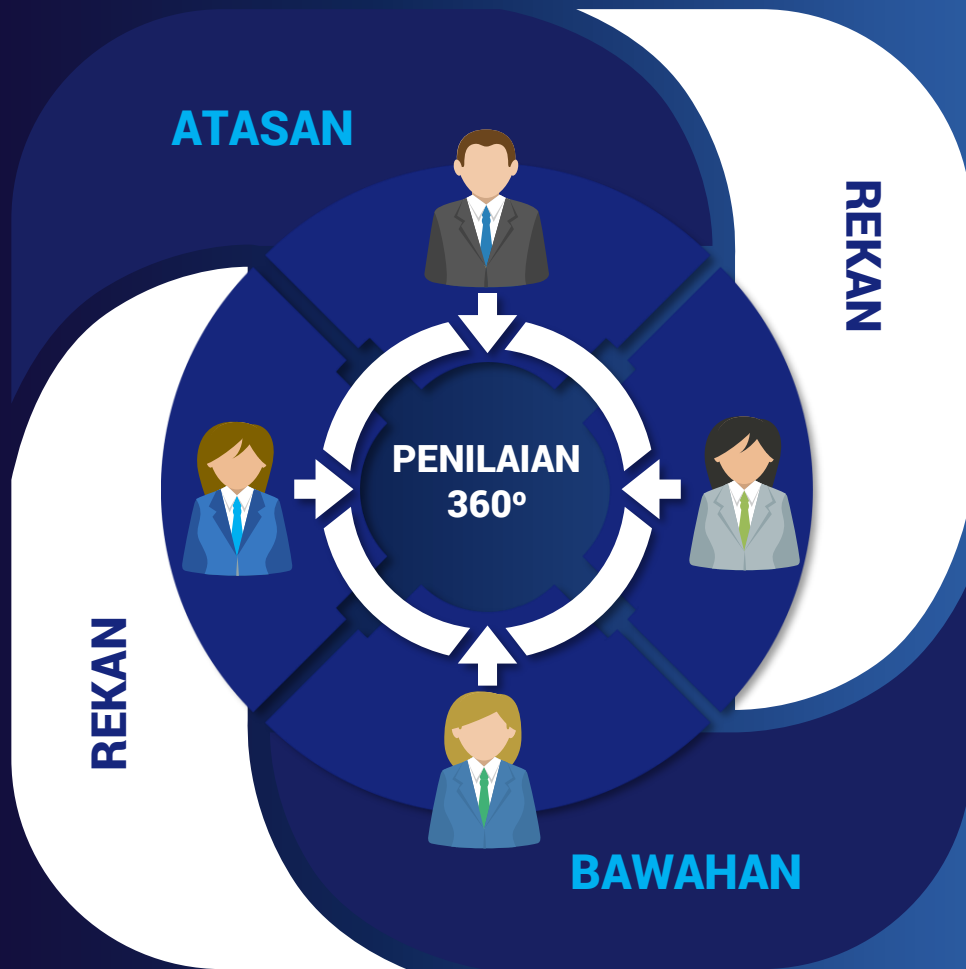
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL



SISTEM
MANAJEMEN
KINERJA PNS

- **PERENCANAAN KINERJA**
- **PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN PEMBINAAN KINERJA**
- **PENILAIAN KINERJA**
- **TINDAK LANJUT**
- **SISTEM INFORMASI KINERJA PNS**

Penilaian Perilaku Kerja 360° & Sistem Informasi Kinerja



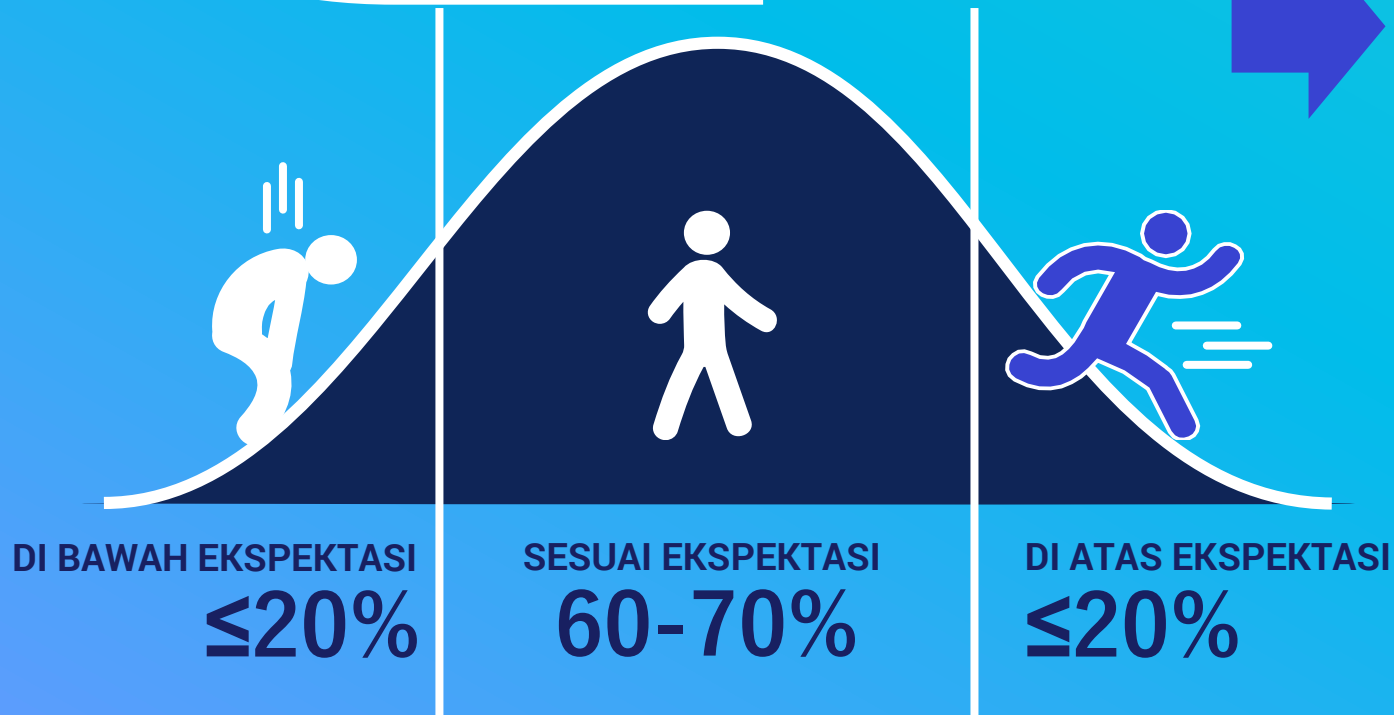
- **Penilaian SKP menggunakan hasil pengukuran kinerja.**
- **Bobot penilaian:**
 - ✓ **Instansi yg tidak menerapkan metode 360°:**
 - **70% SKP dan 30% perilaku kerja**
 - ✓ **Instansi yg menerapkan metode 360°:**
 - **60% SKP dan 40% perilaku kerja**

SISTEM INFORMASI KINERJA PNS:

- **Perencanaan kinerja**
- **Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja**
- **Penilaian kinerja**
- **Tindak lanjut**

PENILAIAN KINERJA UNTUK PEMETAAN TALENTA ASN

Range Nilai	Predikat
▪ < 50	SANGAT KURANG
▪ 50 – 69	KURANG
▪ 70 - 89	CUKUP
▪ 90 – 120 (tanpa ide baru)	BAIK
▪ 110 – 120 (ada ide baru)	SANGAT BAIK



KINERJA

DI BAWAH EKSPEKTASI
SESUAI EKSPEKTASI
DI ATAS EKSPEKTASI



MODEL MANAJEMEN TALENTA ASN NASIONAL



PENUTUP

❑ PENILAIAN KINERJA AKAN EFEKTIF BILA DILAKUKAN SECARA:



❑ OLEH KARENA ITU, PERLU DITERAPKAN **SISTEM MANAJEMEN KINERJA BERBASIS IT.**

❑ PERLU DIBUDAYAKAN **DIALOG KINERJA** ANTARA ATASAN DAN BAWAHAN UNTUK MENGGESER **POLA PIKIR** DAN **PARADIGMA BARU** DALAM **BERKINERJA.**

TERIMA KASIH

